

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi di Era Digitalisasi yang sudah semakin canggih ini mengharuskan setiap perusahaan agar lebih kompeten di dalam menyajikan sebuah laporan keuangan. Laporan yang disajikan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku agar bisa diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Pentingnya peranan auditor di dalam hal ini adalah sebagai penghubung antara kepentingan investor dan perusahaan yang menyediakan laporan keuangan.

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi 2014:9). Profesi akuntan publik memiliki peran penting di dalam melakukan audit laporan keuangan suatu organisasi dan merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Kemampuan auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang baik akan meningkatkan reputasinya sendiri sehingga masyarakat mengharapkan auditor bisa menghasilkan penilaian laporan keuangan yang

tidak memihak kepada siapa pun agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Kompetensi adalah keahlian yang dimiliki auditor dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam SPAP, 2011:210 yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama. Untuk melakukan tugasnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor diantaranya adalah pengetahuan auditor mengenai akuntansi dan pengalaman. Pengetahuan auditor dapat diperoleh dari pendidikan formal yang ditempuh dan penelitian khusus sedangkan pengalaman akan memberikan kemudahan selama proses audit.

Kompetensi saja tidaklah cukup jika tidak memiliki sikap independensi sebagai keahlian dasarnya. Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental tersebut harus meliputi *independence in fact* dan *independence in appearance* (Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:51). Tanpa adanya sikap independensi dari auditor maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Semakin independen seorang auditor maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Kualitas audit merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu

secara konsisten pada setiap penugasannya. (A. Arens, *et al* dalam Amir Abadi Jusuf 2011:47).

Tidak hanya kompetensi dan independensi yang harus dimiliki oleh auditor, auditor juga harus mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis mereka terhadap perusahaan. Etika auditor merupakan prinsip moral yang harus dijadikan pedoman setiap auditor ketika melakukan pekerjaannya. Etika auditor dapat memberikan dampak pencapaian tingkat kualitas hasil audit auditor. (Widya, 2020)

Kualitas Audit apabila dilihat dari Pelaksanaan dan Pelaporan harus mencakup Standar Pekerjaan Lapangan dan Pelaporan Audit.

- Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan (*audit field work*), mulai dari perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, pengumuman bukti-bukti audit, *compliance test*, *substantive test*, *analytical review*, sampai selesai *audit field work*.

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan juga digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

- Standar Pelaporan

Standar pelaporan merupakan pedoman bagi auditor independen dalam menyusun laporan auditnya.

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang sama nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang

jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

Tabel 1. 1
Faktor yang diduga mempengaruhi Kualitas Audit berdasarkan penelitian sebelumnya

Peneliti	Tahun	Kompetensi	Independensi	Etika Auditor	Profesionalisme	Integritas	Akuntabilitas	Objektivitas	Fee Audit
Rudi Lesmana dan Nera Marinda	2015	✓	✓	×	✓	×	×	×	×
Oktaviana Dian Charendra	2017	✓	✓	×	×	×	×	×	×
Clara Susilawati	2018	✓	✓	×	✓	×	×	×	×
Maharany, Yuli Widi Astuti dan Dodik Juliardi	2019	✓	✓	✓	×	×	×	×	×
Arin Dea Laksita dan Sukirno	2019	×	✓	×	×	×	✓	✓	×
Darmawati Baharuddin dan Ikhsan Alwi Ansar	2019	✓	✓	×	×	×	×	×	✓

Dikdik Maulana	2020	✓	×	✓	×	✓	×	×	×
----------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Kualitas Audit antara lain:

1. Kompetensi, diteliti oleh Rudi Lesmana dan Nera Marinda (2015), Oktaviana Dian Charendra (2017), Clara Susilawati (2018), Maharany, Yuli Widi Astuti dan Dodik Juliardi (2019), Darmawati Baharuddin dan Ikhsan Alwi Ansar (2019), serta Dikdik Maulana (2020).
2. Independensi, diteliti oleh Rudi Lesmana dan Nera Marinda (2015), Oktaviana Dian Charendra (2017), Clara Susilawati (2018), Maharany, Yuli Widi Astuti dan Dodik Juliardi (2019), Arin Dea Laksita dan Sukirno (2019), serta Darmawati Baharuddin dan Ikhsan Alwi Ansar (2019), serta Dikdik Maulana (2020).
3. Etika Auditor diteliti oleh Maharany, Yuli Widi Astuti dan Dodik Juliardi (2019).
4. Profesionalisme diteliti oleh Rudi Lesmana dan Nera Marinda (2015) dan Clara Susilawati (2018).
5. Integritas diteliti oleh Dikdik Maulana (2020).
6. Akuntabilitas diteliti oleh Arin Dea Laksita dan Sukirno (2019).
7. Objektivitas diteliti oleh Arin Dea Laksita dan Sukirno (2019).
8. Fee Audit diteliti oleh Darmawati Baharuddin dan Ikhsan Alwi Ansar (2019).

Fenomena yang terkait mengenai kualitas audit yaitu terjadi pada kasus dua anggota kantor akuntan publik terbesar di dunia *Big Four* yaitu KPMG dan PwC. *Securities and Exchanges Commission (SEC)* memberikan sanksi berupa denda sebesar lebih dari US\$ 6,2 juta atau GBP 4,8 juta kepada KPMG karena telah gagal dalam auditnya terhadap Perusahaan Energi *Miller Energy Resources* yang telah melakukan peningkatan nilai tercatat asetnya secara signifikan sebesar 100 kali lipat dari nilai riilnya di laporan keuangan tahun 2011. KPMG pun telah menerbitkan pendapat *unqualified* atas laporan keuangan tersebut. *Financial Reporting Council* yang berada di Inggris juga memberikan sanksi denda kepada PwC sebesar GBP 5,1 juta setelah PwC mengakui kesalahan dalam auditnya terhadap kantor akuntan terbesar ketujuh di Britania Raya, RSM Tenon Group di tahun buku 2011.

Baik kantor akuntan publik maupun perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan yang bermuatan *fraud* telah sepakat untuk membayar denda tanpa menyangkal temuan otoritas keuangan tersebut. Selain itu, seperti pengenaan sanksi yang lain, partner kantor akuntan publik dikenakan *suspend* atau dilarang memberikan jasa auditnya selama 2 (dua) tahun.

Kedua kantor akuntan publik terbesar di dunia telah gagal dalam melaksanakan auditnya. Kegagalan audit itu umumnya diketahui setelah skandal *fraud* akuntansi muncul ke publik serta ditemukan oleh otoritas keuangan atau diketahui setelah perusahaan terbuka dimaksud mengalami krisis keuangan dan kepailitan. Kegagalan audit atas laporan keuangan disebabkan akuntan publik dan tim auditornya tidak

melaksanakan standar auditnya sebagaimana yang diharapkan. Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa kompetensi auditor sangat lah penting unntuk mengurangi kegagalan audit atas laporan keuangan.

Fenomena lainnya adalah kegagalan audit atas laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011. *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)* yang merupakan lembaga yang mengawasi praktik audit menjatuhkan hukuman kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman, dan Surja beserta partner *Ernst and Young (EY)* Indonesia karena terbukti berperan dalam kegagalan audit laporan keuangan PT Indosat Tbk. *EY* Indonesia diberikan denda sebesar US\$ 1 juta dan denda terhadap akuntan publik yang merupakan partner *EY* Indonesia yaitu Roy Iman Wirahardja sebesar US\$ 20.000 ditambah larangan praktek selama 5 (lima) tahun.

Hukuman itu dijatuhkan karena KAP Purwanto, Suherman dan Surja telah gagal dalam menyajikan bukti yang mendukung perhitungan sewa 4.000 menara seluler yang terdapat di dalam laporan keuangan Indosat. KAP Purwanto, Suherman dan Surja malah memberikan label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut dimana perhitungan dan analisisnya belum selesai. Fenomena ini membuktikan bahwa seharusnya auditor dapat mengeluarkan opini berdasarkan bukti agar auditor tersebut dinilai lebih independen dan berkompentensi.

Dari fenomena diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat permasalahan terhadap kualitas audit atas laporan keuangan yang disebabkan oleh kurangnya kompetensi, sikap independensi dan kewaspadaan dalam melakukan pemeriksaan serta

tidak dipatuhinya etika profesi maupun standar audit yang berlaku. Akuntan publik harus memenuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang integritas, kompetensi, kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. Kualitas pelaksanaan audit mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan meliputi standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan (IAI SPAP, 2011) dengan kata lain, audit dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing yang telah ditetapkan. Zein, *et al* (2012) menyatakan bahwa auditor dituntut untuk tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah moral agar kualitas audit dan citra profesi akuntan publik tetap terjaga.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Maharany, Yuli Widi Astuti dan Dodik Juliardi (2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit.”

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel Y. Peneliti menggunakan variabel Y yaitu Kualitas Audit dengan memfokuskan pada Standar Pekerjaan Lapangan dan Pelaporan Audit.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya kelalaian auditor dalam pencatatan sehingga menyebabkan kegagalan audit.
2. Auditor masih belum mematuhi standar audit yang berlaku menyebabkan rendahnya kualitas audit yang dihasilkan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah tersebut adalah berikut :

1. Bagaimana Kompetensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Kota Bandung.
2. Bagaimana Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Kota Bandung.
3. Bagaimana Etika Profesi Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Kota Bandung.

4. Bagaimana Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada KAP yang terdaftar di OJK di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada KAP yang terdaftar di OJK di Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit pada KAP yang terdaftar di OJK di Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kompetensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Independensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Etika Profesi Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Kualitas Audit auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Kota Bandung.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Independensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Etika Profesi Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dan wawasan penulis mengenai permasalahan yang terjadi dalam bidang audit khususnya pengaruh kompetensi, independensi dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit.

2. Bagi Auditor

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk para auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya meningkatkannya.

3. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) khususnya auditor untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh kompetensi, independensi dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam bidang akuntansi dan audit khususnya mengenai pengaruh kompetensi, independensi dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi teori yang telah ada dan dapat menjadi rujukan atas referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bandung dengan responden yang akan diteliti adalah auditor-auditor yang bekerja di 10 KAP yang terdaftar di OJK di Kota Bandung. Adapun waktu dan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga penelitian ini selesai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Audit

2.1.1.1 Definisi Auditing

Pengertian *auditing* diberikan oleh beberapa ahli di bidang akuntansi di antaranya menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:2) definisi *auditing* adalah :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Yang dialihbahasakan sebagai berikut :

“Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Sedangkan Menurut Mulyadi (2014:9) :

“Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diinterpretasikan bahwa audit atau pemeriksaan harus dilakukan oleh orang yang independen dan berkompeten

terhadap laporan keuangan yang disajikan kliennya atau manajemen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan.

2.1.1.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:12) audit dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan jenis pemeriksaan yaitu :

1. *Audit Operasional (Operational Audit)*
 Audit Operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contohnya, audit mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektivitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit daripada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.
2. *Audit Ketaatan (Compliance Audit)*
 Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen bukan kepada pengguna luar karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini seringkali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.
3. *Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)*
 Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, walaupun auditor mungkin saja

melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau saji lainnya.

2.1.1.3 Jenis-jenis Auditor

Auditor merupakan salah satu profesi dalam bidang akuntansi yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi dan juga aktivitas audit yang dilakukan oleh seorang auditor untuk menemukan suatu ketidakwajaran terkait dengan informasi yang disajikan.

Pengertian auditor menurut Mulyadi (2014:71) adalah :

“Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditee untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji.”

Jenis-jenis auditor menurut A. Arens, *et al* (2015:38) yaitu :

1. Kantor Akuntan Publik
Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi non komersial yang lebih kecil. Kantor Akuntan Publik biasa disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.
2. Auditor Internal Pemerintah
Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasional berbagai program pemerintah.

3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan
Auditor badan pemeriksa keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR.
4. Auditor Pajak
Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama ditjen pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan disebut auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka.
5. Auditor Internal
Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Sama seperti BPK mengaudit DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka.

2.1.1.4 Tujuan Auditing

Berdasarkan beberapa definisi audit yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari audit umumnya adalah untuk menyatakan suatu opini atas kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini, auditor perlu mengumpulkan bukti kompeten yang cukup serta mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan. Dengan demikian, tujuan audit mengharuskan akuntan untuk memberikan opini atas ketepatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar *auditing*.

Tujuan audit menurut A. Arens, *et al* (2015:168) adalah :

“Untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material,sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.”

Sedangkan menurut Theodorus M. Tuanakotta (2011:84) :

“Mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”

2.1.1.5 Standar *Auditing*

Untuk melakukan *auditing*, diperlukan standar yang dapat dijadikan acuan dalam audit. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kodifikasi dari berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia. SPAP juga merupakan hasil dari pengembangan berkelanjutan standar profesional akuntan publik yang dimulai sejak 1973. SPAP dikeluarkan oleh dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia.

Standar *Auditing* yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Sukrisno Agoes (2012:33) adalah :

1. Standar Umum
2. Standar Pekerjaan Lapangan

3. Standar Pelaporan

Kualitas Audit apabila dilihat dari Pelaksanaan dan Pelaporan harus mencakup Standar Pekerjaan Lapangan dan Pelaporan Audit.

- Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan (*audit field work*), mulai dari perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, pengumuman bukti-bukti audit, *compliance test*, *substantive test*, *analytical review*, sampai selesai *audit field work*.

 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan juga digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

- Standar Pelaporan

Standar pelaporan merupakan pedoman bagi auditor independen dalam menyusun laporan auditnya.

 - a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
 - c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
 - d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang sama nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

Standar ini mengatur auditor untuk menyatakan apakah laporan keuangan yang diperiksa sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informatif dalam pelaporan keuangan, dan pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

2.1.1.6 Tahapan Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2017:5) proses audit adalah urutan dari pekerjaan awal penerimaan penugasan sampai dengan penyerahan laporan audit kepada klien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Perancangan Audit (*Plan and Design an Audit Approach*):
2. Pengujian Atas Pengendalian dan Pengujian Transaksi (*Test of Controls dan Transaction*)
3. Pelaksanaan Prosedur Analitis dan Pengujian Terinci Atas Saldo (*Perform Analytical Procedure and Test of Details of Balance*)
4. Penyelesaian audit (*Complete the Audit*)

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tahapan audit adalah urutan yang harus dilalui dalam audit. Tahapan tersebut akan membantu auditor dalam mengenali klien dan memastikan bahwa pelaksanaan audit telah dilakukan sesuai rencana dan tidak melanggar standar *auditing*.

2.1.1.7 Tanggung Jawab Auditor

Menurut Alvin A. Arens, *et al* (2015:170) tanggung jawab auditor yaitu :

“Tujuan keseluruhan auditor, dalam melakukan audit atas laporan keuangan adalah untuk :

- a. Memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku; dan
- b. Melaporkan tentang laporan keuangan dan berkomunikasi seperti yang disyaratkan oleh standar *auditing*, sesuai dengan temuan auditor.”

2.1.2 Kompetensi Auditor

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi

Kompetensi auditor mengarah pada kemampuan seorang auditor untuk menggunakan segala sumber daya yang dimiliki dalam menganalisa temuan-temuan yang didapat selama proses audit, mengelompokkannya, serta memberikan respon secara memadai dalam rangka meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Konsep kompetensi dipahami sebagai kolaborasi antara pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang memadai. Adapun pengertian kompetensi menurut para ahli ialah sebagai berikut :

Kompetensi menurut A. Arens, *et al* (2015:63) adalah :

“Competence as a requirement for auditors to have formal education on field of auditing and accounting, adequate practical experience for workers who ar being carried out, as well as continuing professional education.”

Definisi tersebut dialihbahasakan oleh Herman Wiowo sebagai berikut :

“Kompetensi merupakan kebutuhan bagi auditor yang didapat auditor melalui pendidikan formal dalam bidang audit dan akuntansi, maupun melalui pengalaman kerja serta pendidikan profesional sejenis.”

Sedangkan menurut Arum Ardianingsih (2018:26) :

“Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa menyelesaikan pekerjaannya.”

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu audit yang dilakukan oleh seorang auditor harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pelatihan teknis yang cukup memadai agar dapat menyelesaikan auditnya dengan hasil yang maksimal.

2.1.2.2 Komponen Kompetensi

Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja.

Arum Ardianingsih (2018:28) menyatakan bahwa pengetahuan akan mempengaruhi kompetensi auditor yang pada gilirannya akan menentukan kualitas audit. Adapun secara umum ada 5 (lima) pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor yaitu :

- a. Pengetahuan Pengauditan Umum
- b. Pengetahuan Area Fungsional
- c. Pengetahuan mengenai isu-isu Akuntansi yang paling terbaru
- d. Pengetahuan Mengenai Industri Khusus
- e. Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

2.1.2.3 Karakteristik Kompetensi Audit

Menurut M. Lyle Spencer dan M. Signe Spencer, Mitrani *et al* yang dikutip oleh Surya Darma (2013:110-111) terdapat 5 (lima) karakteristik kompetensi diantaranya yaitu :

1. *Motives* adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan.
2. *Traits* adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu.
3. *Self Concept* adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
4. *Knowledge* adalah pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu.
5. *Skill* adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

2.1.2.4 Jenis-jenis Kompetensi Auditor

Adapun kompetensi menurut De Angelo dalam Kusharyanti (2003) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni sudut pandang Auditor Individual, Audit Tim, dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Masing-masing sudut pandang akan dibahas mendetail berikut ini :

- a. Kompetensi Auditor Individual
Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan

khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien.

b. **Kompetensi Audit Tim**

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerja menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari audit junior, audit senior, manajer partner dan partner. Kerja sama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi.

c. **Kompetensi dari sudut pandang KAP**

KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi di pasar, juga mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien.

2.1.2.5 Manfaat Kompetensi

Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting dan sebagai unggulan di bidang tersebut. Manfaat kompetensi menurut Serdamayanti (2013:126) yaitu :

1. Memperjelas standar kerja dan arahan yang ingin dicapai
2. Alat seleksi karyawan
3. Memaksimalkan produktivitas
4. Dasar pengembangan sistem remunerasi
5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan
6. Menyelesaikan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi

Kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Maka dapat disimpulkan manfaat kompetensi bagi seorang auditor adalah membantu auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik.

Auditor dengan tingkat kompetensi yang memadai juga mampu memberikan interpretasi terhadap temuan yang didapatkan dalam Laporan Keuangan.

2.1.2.6 Aspek Kompetensi Auditor

Kompetensi diperlukan sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan kinerja yang memuaskan di tempat kerja dan juga memajukan karakteristik pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki. Hal ini juga memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggungjawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan. Dengan keseluruhan pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Seperti yang dikatakan oleh Timothy J. Louwers, *et al* (2013:43) sebagai berikut :

“Competence starts from the level of education in accounting because auditors who have a supportive level of education will be able to understand accounting standards, financial reports and audits better. The education in question is formal education at the university level as the first step in starting a career as an auditor, an auditor is also required to continue professional education so that the knowledge possessed remains relevant to the changes that occur. In fact, one of the main requirements for obtaining a CPA degree is continuing professional education, and another aspect that is no less important is experience.”

Yang dialihbahasakan sebagai berikut:

“Kompetensi dimulai dari tingkat pendidikan di bidang akuntansi karena auditor yang memiliki tingkat pendidikan yang menunjang akan mampu

memahami standar akuntansi, laporan keuangan dan audit secara lebih baik. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal di tingkat universitas sebagai langkah awal dalam memulai karir sebagai seorang auditor, seorang auditor juga dituntut untuk melanjutkan pendidikan profesional agar pengetahuan yang dimiliki tetap relevan dengan perubahan yang terjadi. Pada faktanya salah satu syarat utama untuk mendapatkan gelar CPA adalah melanjutkan pendidikan profesional, dan aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah pengalaman.”

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, kompetensi auditor akan diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Timothy J. Louwers, *et al* (2013:43), yang meliputi :

1. Pengetahuan (*Knowledge*)
 Dalam menjalankan tugas nya, seorang auditor harus memiliki Pengetahuan (*knowledge*) untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan ini meliputi :
 - a. Memiliki kemampuan untuk melakukan *analytical review*.
 - b. Memiliki pengetahuan tentang *auditing*.
 - c. Memiliki pengetahuan dasar tentang segala hal yang berkaitan tentang lingkungan organisasi dan entitas bisnis, dalam hal ini adalah penggunaan perangkat lunak audit, dan lingkungan berbasis *electronic data processing (EDP)*.
2. Pendidikan (*Education*)
 Kriteria pendidikan yang harus dimiliki auditor antara lain :
 - a. Memiliki tingkat pendidikan formal yang mendukung dalam proses audit.
 - b. Memiliki tingkat pendidikan lanjutan profesi auditor
3. Pengalaman (*Experience*)
 Dalam menjalankan tugas sebagai auditor, pengalaman merupakan dimensi lain dari kompetensi yang memudahkan auditor menemukan kesalahan yang tidak umum dalam audit. Pengalaman dalam hal ini meliputi :
 - a. Pengalaman dalam melakukan *auditing* dalam berbagai entitas bisnis.
 - b. Pengalaman dalam penggunaan teknologi informasi dalam lingkungan bisnis berbasis *electronic data processing (EDP)* maupun audit pada umumnya dengan tujuan efektivitas dan efisiensi audit.”

2.1.3 Independensi Auditor

2.1.3.1 Pengertian Independensi

Independensi dalam audit adalah cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun, artinya keberadaan kita adalah mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu.

Independensi menurut A. Arens *et al* (2015:111) adalah :

“Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, maka audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa ada pengaruh dari luar.”

Sedangkan menurut Mulyadi (2014:26) adalah :

“Independensi dapat diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.”

Theodorus M Tunanakotta (2011:64) menyatakan bahwa independensi yaitu :

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan.”

Berdasarkan beberapa pengertian Independensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Independensi merupakan salah satu komponen yang harus dijaga dan dipertahankan oleh akuntan publik. Independensi dimaksudkan agar auditor mempunyai kebebasan posisi dalam mengambil sikap dalam hubungannya dengan pihak luar terkait dengan tugas yang dilaksanakannya.

2.1.3.2 Jenis-jenis Independensi

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:103)

mengemukakan dalam independensi terdapat 2 (dua) unsur, yaitu :

1. Independensi dalam berpikir (*independence in mind*)
Independensi dalam berpikir mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Independensi dalam berpikir mencerminkan persyaratan lama bahwa angara harus independen dalam fakta.
2. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*)
Independensi dalam penampilan merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:34-35) pengertian independen bagi akuntan publik dibagi menjadi 3 (tiga) jenis independensi, diantaranya yaitu :

1. *Independence in appearance* (independensi dilihat dari penampilannya di struktur organisasi perusahaan).

2. *In fact*, akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesionalnya, bisa menjaga integritas dan selalu menaati kode etik profesionalnya, profesi akuntan publik, dan standar profesional akuntan publik. Jika tidak demikian, akuntan publik *in fact* tidak independen.
3. *In mind*, misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit *adjustment* yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan *findings* tersebut untuk memeras klien walaupun hanya baru terpikirkan dan belum dilaksanakan. *In mind* auditor sudah kehilangan independensi nya.

Berdasarkan jenis-jenis Independensi yang dikemukakan diatas, maka seorang auditor harus memiliki sikap jujur. Tidak hanya kepada pihak manajemen dan pemilik perusahaan, namun seorang auditor harus jujur kepada semua pihak termasuk masyarakat, agar masyarakat dapat menilai sejauh mana auditor telah bekerja dan tidak meragukan independensi dan objektivitas auditor. Selain itu, auditor juga harus mempunyai sikap tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu dalam mempertimbangkan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan.

2.1.3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Independensi

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:108) menyatakan bahwa ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi independensi yaitu :

1. Kepemilikan finansial yang signifikan
Kepemilikan finansial dalam perusahaan yang diaudit termasuk kepemilikan dalam instrument utang dan modal (misal pinjaman dan obligasi) dan kepemilikan dalam instrumen derivatif (misal opsi).
2. Pemberian Jasa Non-Audit

Konflik kepentingan yang paling nyata bagi Kantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa non-audit pada kliennya terus menerus menjadi perhatian penting bagi para pembuat regulasi dan pengamat.

3. Imbalan Jasa Non-Audit dan Independensi
Cara auditor untuk berkompetensi mendapatkan klien dan menetapkan imbalan jasa audit dapat memberikan implikasi penting bagi kemampuan auditor untuk menjaga independensi audit nya.
4. Tindakan Hukum antara KAP dan Klien, serta Independensi
Ketika terdapat tindakan hukum atau niat untuk memulai tindakan hukum antara sebuah KAP dengan kliennya, maka kemampuan KAP dan kliennya untuk tetap objektif dipertanyakan.
5. Pergantian Auditor
Riset di bidang audit mengindikasikan beragam alasan dimana manajemen dapat memutuskan untuk mengganti auditor nya. Alasan-alasan tersebut termasuk mencari pelayanan dengan kualitas yang lebih baik dan mengurangi biaya.

2.1.3.4 Aspek Independensi

Theodorus M. Tuanakotta (2011:7) menekankan 3 (tiga) aspek/jenis dari independensi sebagai berikut :

1. *Programming Independence*
Programming Independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik, prosedur audit, berapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu ditetapkan.
2. *Investigative Independence*
Investigative Independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti tidak boleh ada sumber informasi yang legitimasi (sah) yang tertutup sebagai hasil pemeriksaan.
3. *Reporting Independence*
Reporting Independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

Berdasarkan ketiga dimensi independensi tersebut, dikembangkan petunjuk yang mengindikasikan apakah ada pelanggaran atas independensi. Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:7) menyarankan :

1. *Programming Independence*

- a. Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial atau friksi yang dimaksudkan untuk menghilangkan (*eliminate*), menentukan (*specify*), atau mengubah (*modify*) apa pun dalam audit.
- b. Bebas dari intervensi apa pun dari sikap tidak kooperatif yang berkenaan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih.
- c. Bebas dari upaya pihak luar yang memaksakan pekerjaan audit itu *direview* di luar batas-batas kewajaran dalam proses audit.

2. *Investigative Independence*

- a. Akses langsung dan bebas atas seluruh buku, catatan, pimpinan pegawai perusahaan dan sumber informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan, kewajiban dan sumber-sumbernya.
- b. Kerja sama yang aktif dari pimpinan perusahaan selama berlangsungnya kegiatan audit.
- c. Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu *evidential matter* (sesuatu yang mempunyai nilai pembuktian)
- d. Bebas dari kepentingan atau hubungan pribadi yang akan menghilangkan atau membatasi pemeriksaan atas kegiatan, catatan atau orang yang seharusnya masuk dalam lingkup pemeriksaan

3. *Reporting Independence*

- a. Bebas dari perasaan loyal kepada seseorang atau merasa berkewajiban kepada seorang untuk mengubah dampak dari fakta yang dilaporkan.
- b. Menghindari praktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari laporan formal dan memasukannya kedalam laporan informal dalam bentuk apa pun.
- c. Menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas (kabur, samar-samar) baik yang disengaja maupun yang tidak di dalam pernyataan fakta, opini dan rekomendasi dalam interpretasi.
- d. Bebas dari upaya untuk memveto (*judgement*) auditor mengenai apa yang seharusnya masuk dalam laporan audit, baik yang bersifat fakta maupun opini.

Petunjuk-petunjuk yang tertulis Theodorus M. Tuanakotta (2011) sangat jelas dan masih relevan untuk auditor pada hari ini. Petunjuk-petunjuk tersebut menentukan independen atau tidaknya seorang auditor.

2.1.4 Etika Profesi Auditor

2.1.4.1 Definisi Etika

Etika adalah suatu cabang filsafat yang membicarakan tentang perilaku manusia atau dengan kata lain cabang filsafat yang mempelajari tentang baik dan buruk (SR Wilujeng, 2013). Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dan dituangkan dalam bentuk aturan khusus.

Etika profesi auditor telah diatur dalam IAI dimana terdapat 5 (lima) prinsip auditor yang harus dipahami dan dipatuhi yaitu prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan serta perilaku profesional. Dengan berlandaskan etika dan keyakinan individu, pengambilan keputusan audit dapat dilakukan dengan tepat.

Kebanyakan orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai perilaku yang menyimpang dari apa yang mereka yakini dan perilaku yang patut dalam lingkungan mereka. Alasan utama yang menjadi penyebab orang-orang berlaku tidak etis adalah standar etika orang tersebut memilih berlaku egois. Sering kali

keduanya muncul yang menjadi penyebab perilaku tidak etis (Arens, *et al* (2015:60).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik (Abdul Halim, 2015:31). Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan kode etik agar profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya.

Menurut A. Arens, *et al* (2015:125) pengertian etika adalah :

“Ethic can be defined broadly as a set of moral principle or values. Each of us has a set of values, although, we may or may not have considered them explicitly. Philosophers, religious organization and other groups have defined in various ways ideal sets of moral principles or values include laws and regulation, church doctrine, code of business ethics for professional groups such as CPAs, and codes of conduct within organization.”

Yang dialihbahasakan sebagai berikut :

“Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai prinsip atau nilai moral. Masing-masing dari kita memiliki seperangkat nilai, meskipun, kita mungkin atau tidak mungkin mempertimbangkannya secara eksplisit. Para filsuf, organisasi keagamaan dan kelompok lain telah mendefinisikan dalam berbagai cara seperangkat prinsip atau nilai moral yang ideal termasuk undang-undang dan peraturan, doktrin, kode etik bisnis untuk kelompok profesional seperti CPA, dan kode etik dalam organisasi.”

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:49) mendefinisikan bahwa etika profesi adalah :

“Etika Profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. Untuk

mempermudah harus dijelaskan bagaimana masalah hukum dan etika berkaitan walaupun berbeda.”

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa etika profesi merupakan kode etik yang menjadi dasar aturan bagi setiap individu untuk berperilaku profesional dalam menjalankan profesinya.

2.1.4.2 Prinsip Etika Profesi Auditor

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:99) menjelaskan prinsip-prinsip etika yaitu sebagai berikut :

1. Tanggung jawab. Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka.
2. Kepentingan Publik. Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme.
3. Integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi.
4. Objektivitas dan Independensi. Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Anggota yang berpraktik bagi publik harus independen baik dalam fakta maupun dalam penampilan ketika menyediakan jasa audit dan jasa atestasi lainnya.
5. Keseksamaan. Anggota harus memperhatikan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan kemampuan terbaiknya.
6. Ruang Lingkup dan sifat jasa. Anggota yang berpraktik bagi akuntan publik harus memperhatikan prinsip-prinsip Kode Perilaku Profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

2.1.4.3 Aturan Etika

Aturan Etika Akuntan Publik Indonesia telah diatur dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) yang berlaku sejak tahun 2000. Menurut IAI KAP (2011) Aturan Etika terdiri dari :

1. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi

A. Standar Umum

- a) Kompetensi professional Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa professional yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi professional.
- b) Kecermatan dan keseksamaan professional Anggota KAP wajib melakukan pemberian professional dengan kecermatan dan keseksamaan professional.
- c) Perencanaan dan supervisi anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.
- d) Data relevan yang memadai anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.
- e) Kepatuhan terhadap standar: Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa professional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI.

B. Prinsip Akuntansi

Anggota KAP tidak diperkenankan: menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan tersebut.

2. Tanggung jawab dan praktik lain

- a. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.
 - b. Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya
3. Tanggung jawab kepada klien
 - a. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.
 - b. Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi.
 - c. Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku
 - d. Melarang *review* praktik profesional seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau
 - e. Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI KAP dalam rangka penegasan disiplin.
4. Independensi, integritas dan objektivitas
 - a. Independensi dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan public yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independent tersebut harus meliputi independent dalam fakta maupun dalam penampilan.
 - b. Integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain.
5. Tanggung jawab kepada rekan profesi
 - a. Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.
 - b. Komunikasi antar akuntan publik, anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan audit.

2.1.4.4 Dilema Etika

Menurut A. Arens, *et al* (2015:92) dilema etika adalah :

“Situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karier bisnis nya. Auditor yang menghadapi klien yang mengancam akan mencari auditor baru kecuali bersedia menerbitkan suatu pendapat wajar tanpa pengecualian, akan mengalami dilema etika bila pendapat wajar tanpa pengecualian itu tidak tepat.”

Ada cara-cara alternatif untuk menyelesaikan dilema etika, tetapi kita harus berhati-hati untuk menghindari metode yang merasionalkan perilaku tidak etis. Berikut ini adalah metode-metode rasionalisasi yang sering digunakan, yang dengan mudah dapat mengakibatkan tindakan tidak etis.

1. Setiap Orang Pernah Melakukannya
Argumen bahwa memlasukan SPT pajak, mencontek saat ujian. Atau menjual produk yang cacat merupakan perilaku yang dapat diterima umumnya didasarkan pada rasionalisasi bahwa setiap orang lain juga melakukan hal yang sama, sehingga merupakan perilaku yang dapat diterima.
2. Jika Sah Menurut Hukum, Hal itu Etis
Menggunakan argumen bahwa semua perilaku yang sah menurut hukum adalah perilaku yang etis sangat bergantung pada kesempurnaan hukum.
3. Kemungkinan Penemuan dan Konsekuensinya
Filosofi ini bergantung pada evaluasi atas kemungkinan bahwa orang lain akan menemukan perilaku tersebut. Biasanya, orang itu juga akan menilai besarnya kerugian (konsekuensi) yang akan diterimanya bila hal tersebut terbongkar.

Tujuan dari kerangka kerja seperti itu adalah membantu mengidentifikasi isu-isu etis dan memutuskan serangkaian tindakan yang tepat dengan menggunakan nilai dari orang itu sendiri. Pendekatan enam langkah berikut ini dimaksudkan agar dapat menjadi pendekatan yang relative sederhana untuk menyelesaikan dilema etika:

1. Memperoleh fakta yang relevan.
2. Mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut.
3. Menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpengaruhi.
4. Mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternative.
5. Memutuskan tindakan yang tepat.

Suatu ilustrasi akan digunakan untuk menunjukkan bagaimana seseorang bisa menggunakan pendekatan enak langkah ini guna menyelesaikan suatu dilema etika.”

2.1.5 Kualitas Audit

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Arens, *et al* (2015:103) kualitas audit adalah :

“Kualitas audit berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi etika atau integritas auditor , khususnya independensi.”

Mathius Tandiontong (2016:73) mendefinisikan kualitas audit adalah :

“Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien.”

Sedangkan menurut Amir Abadi Jusuf (2011:47) :

“Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya.”

2.1.5.2 Standar Pengendalian Kualitas Audit

Standar Profesional Akuntan Publik (2011:150) menyatakan bahwa standar *auditing* berbeda dengan prosedur *auditing*, yaitu prosedur berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan

tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedut tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor umum juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.

Mulyadi (2014:16) menyatakan bahwa :

“Standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berarti, luas, nilai atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing.”

Menurut SPAP (2011:150) indikator standar audit dari proses mengaudit yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Standar Umum
 - a. Auditor harus dilakukan oleh 2 (dua) orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai auditor.
 - b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
 - b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan dan untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit selanjutnya.
 - c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan

- a. Auditor harus menyatakan dalam laporan audit apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut secara tidak konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
- c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informative belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.
- d. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan, dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor itu harus jelas menunjukkan sifat pekerjaannya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor, dalam laporan auditor.

Menurut PSPM (Pedoman Standar Pengendalian Mutu) No. 01 (SPAP:2011), KAP wajib mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu, sejauh diterapkan dalam prakteknya dalam menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, KAP wajib membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagai berikut :

- a. "Independensi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa pada setiap lapis organisasi, semua staf profesional mempertahankan independensi sebagaimana diatur dalam Aturan Etika Akuntan Publik secara rinci. Aturan etika No. 1 integritas, objektivitas dan independensi memuat contoh-contoh penerapan yang berlaku untuk akuntan publik.
- b. Penugasan personel, yang memberikan keyakinan memadai bahwa penugasan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk penugasan tersebut.
- c. Konsultasi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa personel akan memperoleh informasi yang memadai sesuai yang dibutuhkan.
- d. Supervisi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP.

- e. Pemekerjaan (*hiring*), yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua staf profesionalnya memiliki karakteristik yang tepat sehingga memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten.
- f. Pengembangan Profesional, yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya.
- g. Promosi (*advancement*), yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua personel terseleksi untuk promosi, memiliki kualifikasi seperti yang diisyaratkan untuk menerima tanggung jawab yang lebih tinggi.
- h. Penerimaan dan keberlanjutan klien, yang memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan hubungan dengan klien yang manajemennya yang tidak memiliki integritas.
- i. Inspeksi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur pengendalian mutu seperti tersebut pada butir a sampai dengan h telah diterapkan secara efektif.”

2.1.5.3 Aspek Kualitas Audit

Kualitas hasil pekerjaan auditor bisa juga dilihat dari kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara proses dan hasil . Menurut Amrin Siregar dalam Mathius Tandiontong (2016:251), indikator pengukuran kualitas audit meliputi :

1. *“Input Oriented*
Orientasi Masukan (*Input Oriented*) terdiri dari penugasan personel untuk melaksanakan pemeriksaan, konsultasi dan supervisi.
2. *Process Oriented* digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan. Kualitas audit dapat diukur melalui hasil audit. Adapun hasil audit yang diobservasi yaitu laporan audit orientasi proses (*Process Oriented*) terdiri dari kepatuhan pada standar audit dan pengendalian audit.
3. *Outcome Oriented*

Outcome Oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sudah dapat diambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Orientasi keluaran (*outcome oriented*) terdiri dari kualitas teknis dan jasa yang dihasilkan auditor. Penerimaan dan kelangsungan kerja sama dengan klien dan tindak lanjut atas rekomendasi audit.”

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka terbentuklah kerangka dan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit.

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Menurut A. Arens, *et al* (2015:63) kompetensi adalah :

“Competence as a requirement for auditors to have formal education on field of auditing and accounting, adequate practical experience for workers who ar being carried out, as well as continuing professional education.”

Yang dialihbahasakan sebagai berikut :

“Kompetensi merupakan kebutuhan bagi auditor yang didapat auditor melalui pendidikan formal dalam bidang audit dan akuntansi, maupun melalui pengalaman kerja serta pendidikan profesional sejenis.”

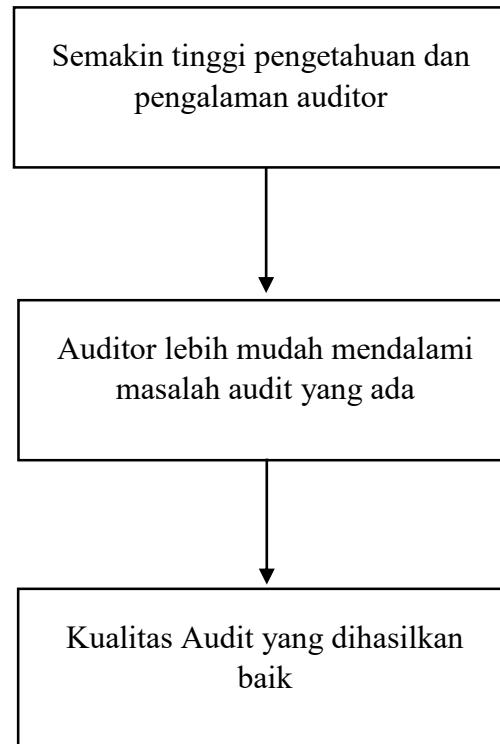
Sukrisno Agoes (2012:146) mendefinisikan kompetensi adalah :

“Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan suatu pekerjaan dengan kualitas hasil yang baik.”

De Angelo dalam Arum Ardianingsih (2018:27) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi dan kliennya mengasumsikan bahwa dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor atau kompetensi auditor. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja.

Auditor sebagai orang yang melakukan audit berkewajiban untuk terus memperluas pengetahuannya. Semakin maksimal pengetahuan yang dimiliki oleh auditor tentunya diiringi dengan semakin banyaknya pengalaman yang diperoleh, maka akan semakin baik dalam memberikan opini dan kualitas auditnya. (KAT Handayani, 2015)

Teori diatas diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Clara Susilawati (2018), Darmawati Baharuddin dan Ikhsan Alwi Ansar (2019), serta Dikdik Maulana (2020) yang menyatakan bahwa Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.



Gambar 2. 1
Skema Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

2.2.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

Independensi dalam *auditing* menurut A. Arens, *et al* (2015:111) adalah :

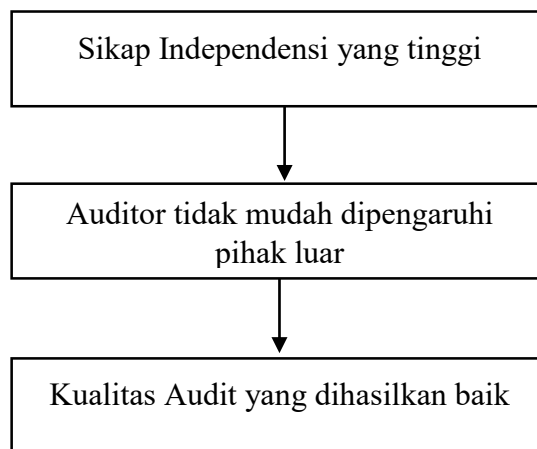
“Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, maka audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa ada pengaruh dari luar.”

Dalam aturan Kode Etik IAPI (2011) disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di

dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. (K Putri, 2014).

Sikap independen yang dimiliki seorang akuntan publik akan menghasilkan kualitas audit yang tidak diragukan hasilnya, laporan keuangan yang diperiksa pun kendalanya dapat dipercaya sehingga para investor atau pun para pemakai laporan keuangan menjadi lebih leluasa untuk mengambil keputusan. (GT Murti, 2017)

Teori diatas diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rudi Lesmana dan Nera Marinda Machdar (2015), Oktaviana Dian Charendra (2017), serta Arin Dea Laksita dan Sukirno (2019) yang menyatakan bahwa Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.



Gambar 2. 2
Skema Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

2.2.3 Pengaruh Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit

Definisi etika profesi secara umum menurut Arens, *et al* (2015:91) adalah sebagai berikut :

“Standar-standar, prinsip-prinsip, interpretasi atas peraturan etika, dan kaidah etika yang harus dilakukan seorang auditor seperti tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, obyektivitas auditor, keseksamaan dan lingkup dan sikap jasa dalam memeriksa laporan keuangan.”

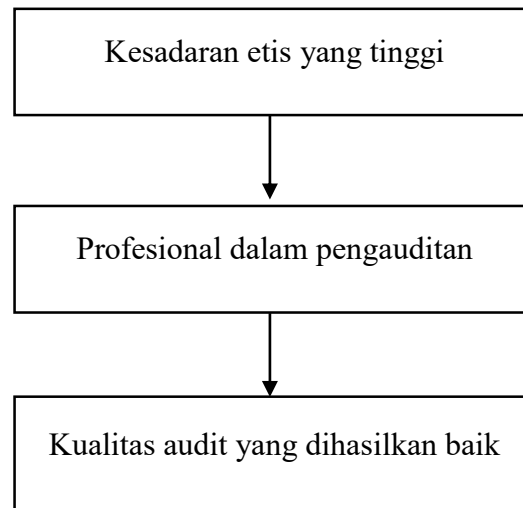
Sukrisno Agoes (2012) menyebutkan bahwa :

“Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional.”

Etika Profesi memiliki peran pada setiap jenis profesi, termasuk akuntan. Oleh sebab itu, ketika auditor menjunjung tinggi etika profesi pada pelaksanaan pengauditan maka kualitas audit akan meningkat.

Dengan kesadaran etis yang tinggi, maka seorang auditor cenderung profesional dalam tugasnya dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi dan standar audit sehingga hasil audit yang dilakukan akan lebih menunjukkan keadaan yang sebenarnya. (Ni Kadek, 2020)

Teori diatas diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maharany, Yuli Widi Astuti dan Dodik Juliardi (2019) serta Dikdik Maulana (2020) yang menyatakan bahwa Etika Profesi berpengaruh terhadap kualitas audit.



Gambar 2. 3
Skema Pengaruh Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit

2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2019:99) menyebutkan bahwa hipotesis adalah sebagai berikut :

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas,

maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_1 : Terdapat Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit.

H_2 : Terdapat Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit.

H_3 : Terdapat Pengaruh Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan deskriptif dan pendekatan verifikatif.

Menurut Sugiyono (2019:48) metode penelitian dengan pendekatan deskriptif adalah :

“Metode penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel yang bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.”

Penelitian dengan metode pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang teliti.

Sedangkan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan verifikatif menurut Sugiyono (2019:8) adalah :

“Penelitian verifikatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Metode pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang dilakukan melalui pengumpulan data. Metode pendekatan verifikatif digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi,

Independensi dan Etika Profesi Auditor serta pengaruhnya terhadap Kualitas Audit yang ada di KAP Wilayah Kota Bandung.

Menurut Sugiyono (2019:2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut :

“Metode penelitian pada dasarnya menerapkan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan penelitian *survey*.

Sugiyono (2019:16) mendefinisikan metode kuantitatif adalah sebagai berikut:

“Metode kuantitatif sering disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery*, karena dengan metode ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data dan penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.”

Kemudian yang dimaksud dengan metode penelitian *survey* menurut Sugiyono (2019:57) adalah :

“Metode Penelitian Survey adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menhujii beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan”.

Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode *survey* yaitu untuk mengetahui gambaran data dari objek penelitian secara detail, menginterpretasikan dan menganalisisnya secara sistematis. Penelitian *survey* digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap fenomena atau isu tertentu. Penulis melakukan *survey* dengan media kuesioner yang disebarakan kepada responden yang telah ditentukan oleh penulis untuk pengumpulan data.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian pada umumnya adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data yang dikaji dalam penelitian, dengan demikian objek penelitian merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dalam penelitian karena pada hakikatnya, objek penelitian menjadi sasaran untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang terjadi.

Sugiyono (2019) menyebutkan bahwa obbjek penelitian adalah :

“Sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang subjektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu).”

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kompetensi, independensi dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK di Kota Bandung.

3.3 Instrumen Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, diperlukannya alat-alat untuk membantu penelitian yang disebut juga dengan instrumen penelitian. Menurut Sugiyono (2019:156) instrumen penelitian adalah :

“Suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.”

Instrumen penelitian digunakan sebagai alat pengumpulan data dan untuk mengukur nilai dari suatu variabel. Instrumen penelitian yang biasa digunakan dalam penelitian adalah beberapa pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diberikan kepada responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. Instrumen penelitian dengan metode kuesioner hendaknya disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah dijabarkan dalam tabel operasionalisasi variabel sehingga masing-masing pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap responden lebih jelas serta dapat terstruktur.

Secara umum teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah teknik Skala *Likert*. Menurut Sugiyono (2019:146) Skala *Likert* adalah :

“Skala *Likert* yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.”

Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut akan dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun *item-item* instrumen yang dapat berupa pernyataan.

3.4 Unit Penelitian

Unit penelitian ini adalah Auditor Eksternal yang berada di 10 Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Kota Bandung.

3.5 Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

3.5.1 Definisi Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian yang sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian yang akan diteliti.

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2019:67) variabel penelitian adalah:

“Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis seberapa besar pengaruh pada dua variabel independen terhadap variabel dependen yaitu Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Definisi variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas (*independent variable*) sebab dari adanya perubahan pada variabel terikat (*Dependent Variabel*).

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel bebas adalah :

“Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Maka dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel independen yang akan diteliti diantaranya adalah :

a. Kompetensi (X1)

A. Arens, *et al* (2015:63) menyatakan bahwa:

“Kompetensi merupakan kebutuhan bagi auditor yang didapat auditor melalui pendidikan formal dalam bidang audit dan akuntansi, maupun melalui pengalaman kerja serta pendidikan profesional sejenis.”

Dimensi yang digunakan penulis untuk mengukur variabel ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan
- 2) Latar belakang pendidikan
- 3) Pengalaman

b. Independensi (X2)

Independensi dalam *auditing* menurut A. Arens, *et al* (2015:111)

adalah:

“Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, maka audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa ada pengaruh dari luar.”

Dimensi yang digunakan penulis untuk mengukur variabel ini adalah sebagai berikut :

- 1) Independensi Program Audit
- 2) Independensi Investigatif
- 3) Independensi Pelaporan

c. Etika Profesi Auditor (X3)

Definisi etika profesi secara umum menurut Arens, *et al* (2015:91)

adalah sebagai berikut :

“Standar-standar, prinsip-prinsip, interpretasi atas peraturan etika, dan kaidah etika yang harus dilakukan seorang auditor seperti tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, obyektivitas auditor, keseksamaan dan lingkup dan sikap jasa dalam memeriksa laporan keuangan.”

Dimensi yang digunakan penulis untuk mengukur variabel ini adalah sebagai berikut :

- 1) Tanggung Jawab
- 2) Kepentingan Publik
- 3) Integritas
- 4) Obyektivitas dan Independensi
- 5) Keseksamaan
- 6) Ruang Lingkup dan Sifat Jasa

2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Sedangkan variabel terikat (*dependent variabel*) menurut Sugiyono (2019:69) adalah :

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kualitas Audit (Y).

Amir Abadi Jusuf mendefinisikan kualitas audit adalah (2011:47) :

“Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya.”

Dimensi yang digunakan penulis untuk mengukur variabel ini adalah sebagai berikut :

- 1) Standar Pekerjaan Lapangan
- 2) Standar Pelaporan

3.5.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel untuk menentukan dimensi dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Operasionalisasi variabel juga bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dapat menggunakan alat bantu yang dapat dilakukan dengan tepat.

Agar lebih mudah dalam memahami mengenai variabel penelitian yang akan digunakan, maka penulis menjabarkannya ke dalam bentuk operasional variabel yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Operasionalisasi Variabel Kompetensi (X1)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No. Item

Kompetensi (X1) “Kompetensi merupakan kebutuhan bagi auditor yang didapat auditor melalui pendidikan formal dalam bidang audit dan akuntansi, maupun melalui pengalaman kerja serta pendidikan profesional sejenis.”	Aspek Kompetensi : 1. Pengetahuan	Memiliki pengetahuan untuk melakukan <i>analytical review</i>	Ordinal	1
		Memiliki pengetahuan tentang akuntansi dan <i>auditing</i>	Ordinal	2
		Memiliki pengetahuan dasar tentang penggunaan perangkat lunak audit	Ordinal	3
	2. Latar belakang pendidikan	Memiliki tingkat pendidikan formal yang mendukung	Ordinal	4
		Pendidikan dan pelatihan profesional yang berkelanjutan		5
	3. Pengalaman	Pengalaman dalam melakukan <i>auditing</i> dalam berbagai entitas bisnis	Ordinal	6
		Memiliki pengalaman dalam penggunaan teknologi	Ordinal	7

Sumber: A. Arens, <i>et al</i> (2015:63)	Sumber: Timothy J. Louwers, <i>et al</i> (2013:43)	informasi dalam lingkungan bisnis berbasis <i>Electronics Data Processing (EDP)</i>		
--	--	---	--	--

Tabel 3. 2
Operasionalisasi Variabel Independensi (X2)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No. Item
Independensi (X2) “Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, maka audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta	Aspek Independensi : 1. Independensi Program Audit	Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial atau friksi yang dimaksudkan untuk menghilangkan (<i>eliminate</i>), menentukan (<i>specify</i>) atau mengubah (<i>modify</i>) apa pun dalam audit	Ordinal	8
		Bebas dari intervensi apa pun dari sikap tidak kooperatif yang berkenaan dengan penerapan prosedur	Ordinal	9

tanpa ada pengaruh dari luar.”		audit yang dipilih		
		Bebas dari upaya pihak luar yang memaksakan pekerjaan audit itu di <i>review</i> di luar batas-batas kewajaran dalam proses audit	Ordinal	10
	2. Independensi Investigatif	Akses langsung dan bebas atas seluruh buku, catatan, pimpinan pegawai perusahaan dan sumber informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan, kewajiban dan sumber-sumbernya.	Ordinal	11
		Kerja sama yang aktif dari pimpinan perusahaan selama berlangsungnya kegiatan audit	Ordinal	12

		Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu <i>evidential matter</i> (sesuatu yang mempunyai nilai pembuktian)	Ordinal	13
		Bebas dari kepentingan atau hubungan pribadi yang akan menghilangkan atau membatasi pemeriksaan atas kegiatan, catatan atau orang yang seharusnya masuk dalam lingkup pemeriksaan	Ordinal	14
	3. Independensi Pelaporan	Bebas dari perasaan	Ordinal	15

		loyal kepada seseorang atau merasa berkewajiban kepada seorang untuk mengubah dampak dari fakta yang di laporkan		
		Menghindari praktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari laporan formal dan memasukkannya ke dalam laporan informal dalam bentuk apa pun	Ordinal	16
		Menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas (kabur, samar-samar) baik yang disengaja maupun yang tidak di dalam pernyataan fakta, opini dan rekomendasi	Ordinal	17
		Bebas dari upaya untuk	Ordinal	18

Sumber: A. Arens, <i>et al</i> (2015:111)	Sumber: Theodorus M. Tuanakotta (2011:7)	memveto (<i>judgement</i>) auditor mengenai apa yang seharusnya masuk dalam laporan audit, baik yang bersifat fakta maupun opini		
---	---	--	--	--

Tabel 3. 3
Operasionalisasi Variabel Etika Profesi Auditor (X3)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No. Item
Etika Auditor (X3) “Standar-standar, prinsip-prinsip, interpretasi atau peraturan etika, dan kaidah etika yang harus dilakukan secara auditor seperti tanggung jawab pofesi, kepentingan	Prinsip-prinsip Etika Profesi : 1. Tanggung jawab	Melaksanakan pertimbangan profesional dalam semua pelaksanaan audit	Ordinal	19
		Memiliki moral yang sensitif dalam semua pelaksanaan audit		20
	2. Kepentingan Publik	Melayani kepentingan publik	Ordinal	21
		Menghargai kepercayaan publik		22
		Menunjukkan komitmen profesionalisme		23
	3. Integritas	Mempertahankan kepercayaan publik	Ordinal	24
		Memperluas kepercayaan publik		25

public, integritas, obyektivitas auditor, keseksamaan dan lingkup dan sikap jasa dalam memeriksa laporan keuangan”. Sumber: A. Arens, <i>et al</i> (2015:91)	4. Objektivitas dan Independensi	Mempertahankan obyektivitas	Ordinal	26
		Mempertahankan independensi		27
	5. Keseksamaan	Memperhatikan standar teknis	Ordinal	28
		Memperhatikan etis profesi		29
		Meningkatkan kompetensi		30
	6. Ruang Lingkup dan Sifat Jasa Sumber: A. Arens, <i>et al</i> (2015:99)	Memperhatikan ruang lingkup	Ordinal	31
		Memperhatikan sifat jasa		32

Tabel 3. 4
Operasionalisasi Variabel Kualitas Audit (Y)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No. Item
Kualitas Audit (Y) “Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu	Standar Kualitas Audit : 1. Pelaksanaan (Standar Pekerjaan Lapangan)	Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.	Ordinal	33
				34
		Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya,	Ordinal	35

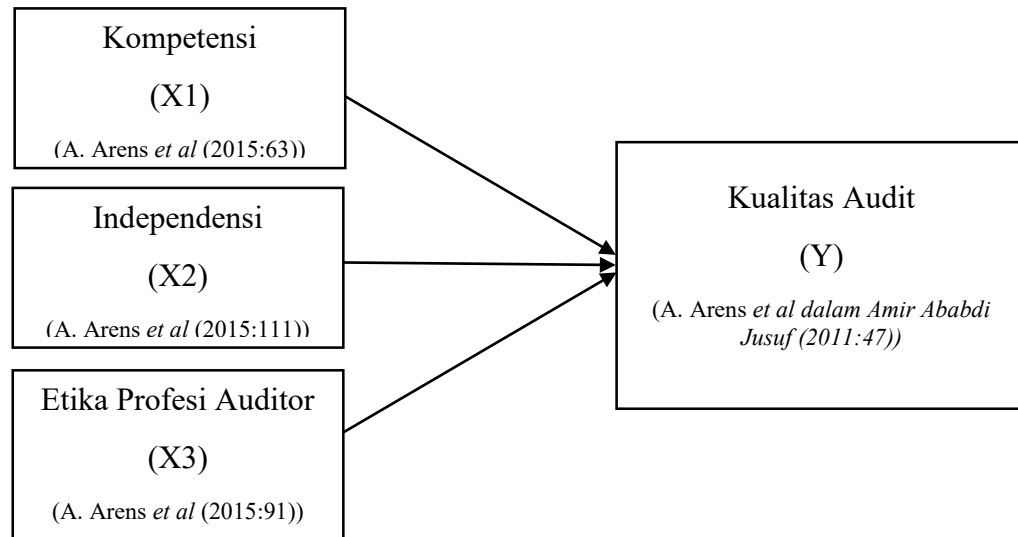
memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya.”		termasuk pengendalian internal.		
		Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan	Ordinal	36
	2. Administrasi Akhir (Standar Pelaporan)	Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.	Ordinal	37
		Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak	Ordinal	38

A. Arens, <i>et al</i> dalam Amir Abadi Jusuf (2011:47)	SPAP (2011:150)	secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.		
		Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit	Ordinal	39
		Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan, dalam laporan auditor	Ordinal	40

3.5.3 Model Penelitian

Model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini, sesuai dengan judul skripsi “Pengaruh Kompetensi,

Independensi dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit.” Maka model penelitian ini dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 3. 1
Model Penelitian

Keterangan :

—————→ Pengaruh Parsial

3.6 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel Penelitian

3.6.1 Populasi Penelitian

Populasi menurut Sugiyono (2019:126) adalah sebagai berikut :

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Pada penelitian ini yang menjadi sasaran populasi adalah auditor pada 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan jumlah 60 Auditor. Adapun dalam penelitian ini jumlah populasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 5
Populasi Penelitian

NO	Nama Kantor Akuntan Publik	Jumlah Auditor
1	KAP Djoermana, Wahyudin & Rekan	7 Auditor
2	KAP Roebiandini & Rekan	8 Auditor
3	KAP Sabar & Rekan	7 Auditor
4	KAP Dra. Yati Ruhiyati	5 Auditor
5	KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	6 Auditor
6	KAP Jahja Gunawan, S.E., Ak., CA., CPA	5 Auditor
7	KAP Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan	6 Auditor
8	KAP Drs. Sanusi & Rekan	5 Auditor
9	KAP Nano Suyatna	6 Auditor
10	KAP Dr. Agus Widarsono, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA	5 Auditor
Jumlah Populasi		60 Auditor

(Sumber : www.ojk.go.id)

3.6.2 Teknik Sampling

Sugiyono (2019:128) mengatakan bahwa teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam menentukan sampel terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan yaitu *probability sampling*. Menurut Sugiyono (2019:129) *probability sampling* adalah :

“*Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.”

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sample random sampling*.

Menurut Sugiyono (2019:129) yang dimaksud dengan *sample random sampling*, yaitu :

“*Simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.”

3.6.3 Sampel Penelitian

Sugiyono (2019:127) menyebutkan sampel penelitian adalah sebagai berikut:

“Sampel adalah bagian dan jumlah populasi dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).”

Dengan berpedoman pada pendapat Arikunto (2012:109) yang menyatakan bahwa :

“Untuk pedoman umum dapat dilakukan bahwa bila populasi di bawah 100 orang, maka dapat digunakan sampel 50% dan jika di atas 100 orang digunakan sampel 15%.”

Maka berdasarkan definisi di atas, maka sampel yang diambil sebesar 50% dari jumlah populasi sebanyak 60 orang yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan perhitungan $50\% \times 60 = 30$ Responden.

Tabel 3. 6
Distribusi Sampel

No	Nama KAP	Jumlah Auditor	Perhitungan	Sampel
1	KAP Djoermana, Wahyudin & Rekan	7 Auditor	$\frac{7}{60} \times 30 = 4$	4
2	KAP Roebiandini & Rekan	8 Auditor	$\frac{8}{60} \times 30 = 4$	4
3	KAP Sabar & Rekan	7 Auditor	$\frac{7}{60} \times 30 = 4$	4
4	KAP Dra. Yati Ruhiyati	5 Auditor	$\frac{5}{60} \times 30 = 3$	3
5	KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	6 Auditor	$\frac{6}{60} \times 30 = 3$	3
6	KAP Jahja Gunawan, S.E., Ak., CA., CPA	5 Auditor	$\frac{5}{60} \times 30 = 3$	3
7	KAP Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan	6 Auditor	$\frac{6}{60} \times 30 = 3$	3
8	KAP Drs. Sanusi & Rekan	5 Auditor	$\frac{5}{60} \times 30 = 3$	3
9	KAP Nano Suyatna	6 Auditor	$\frac{6}{60} \times 30 = 3$	3

10	KAP Dr. Agus Widarsono, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA	5 Auditor	$\frac{5}{60} \times 30 = 3$	3
Total Sampel				33

3.7 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.7.1 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan oleh penulis dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan. Menurut Sugiyono (2019:194) Sumber data primer adalah sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner kepada auditor yang berada di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data primer ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang diberikan kepada responden mengenai identitas responden.

3.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh

penulis dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder secara landasan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam pembahasan penelitian kepustakaan dengan cara membaca literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu :

a. Kuesioner (angket)

Adapun menurut Sugiyono (2019:199) Kuesioner adalah sebagai berikut :

“Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan daftar pernyataan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara berstruktur yang dianggap perlu. Pengisian kuesioner ini didasarkan dengan penelitan yang dibutuhkan.”

3.8 Metode Analisis Data

Metode Analisis Data menurut Sugiyono (2019:206) adalah sebagai berikut :

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabilasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.”

3.8.1 Uji Validitas dan Uji Reabilitas Instrumen

3.8.1.1 Uji Validitas Instrumen

Uji Validitas adalah suatu derajat kepastian anatar data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dikumpulkan. Validitas sebagai salah satu cara untuk mengetahui derajat ketepatan atau keandalan pengukuran instrument mengenai isi pertanyaan.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Sugiyono, 2019)

Keputusan Uji Validitas menurut Sugiyono (2019:182) ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika $r \geq 0,30$, maka *item-item* pertanyaan dari kuesioner adalah valid
- b. Jika $r \leq 0,30$, maka *item-item* pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid

Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan metode *Pearson Product Moment* sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n(\sum X_i^2) - (\sum X_i)^2\}\{n(\sum Y_i^2) - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi *product moment*

n = Jumlah Responden

$\sum XY$ = Jumlah perkalian variabel X dan Y

$\sum X$ = Jumlah nilai variabel X

$\sum Y$ = Jumlah nilai variabel Y

$\sum X^2$ = Jumlah pangkat dua nilai variabel X

$\sum Y^2$ = Jumlah pangkat dua nilai variabel

3.8.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Sugiyono (2019:176) menyebutkan bahwa hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.”

Metode yang digunakan dalam pengujian alat ukur pada penelitian ini adalah metode *Cronbach Alpha* (α) yang terdapat dalam program SPSS. Jika *cronbach alpha* α lebih besar dari 0,6 maka alat uji tersebut dikatakan reliabel.

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_x^2} \right)$$

Keterangan :

k = Jumlah soal atau pertanyaan

σ_i^2 = Variasi setiap pertanyaan

σ_x^2 = Variasi total tes

$\sum \sigma_i^2$ = Jumlah seluruh variasi setiap soal atau pertanyaan

3.8.2 Transformasi Data Ordinal Menjadi Interval

Data penelitian diperoleh dari jawaban kuesioner responden dengan menggunakan skala *likert*, dari skala pengukuran *likert* tersebut maka akan diperoleh data ordinal. Agar dapat dianalisis secara statistic, data tersebut harus dinaikkan menjadi skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval (MSI)* dapat merubah data ordinal menjadi skala interval secara berurutan. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan *Method of Successive Interval (MSI)* adalah sebagai berikut :

1. Perhatikan setiap butir jawaban responden dari kuesioner yang disebarkan.
2. Untuk setiap butir pertanyaan tentukan frekuensi (f) responden yang menjawab skor 1,2,3,4, dan 5 untuk setiap *item* pertanyaan.
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi.
4. Menentukan proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor.

5. Menentukan nilai z untuk setiap proporsi kumulatif.
6. Menentukan skala (*Scala Value* = SV) untuk setiap skor jawaban yang diperoleh (dengan menggunakan Tabel Tertinggi Dimensi)
7. Menghitung *Scala Value* (SV) untuk masing-masing responden dengan menggunakan rumus :

$$\text{Scala Value} = \frac{(\text{densitas at lower limit} - \text{densitas at upper limit})}{(\text{area below upper limit} - \text{area below lower limit})}$$

Keterangan :

densitas at lower limit → Kepadatan batas bawah

densitas at upper limit → Kepadatan batas atas

area below upper limit → Daerah di bawah batas atas

area below lower limit → Daerah di bawah batas bawah

3.8.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami. Analisis deskriptif juga berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Analisis deskriptif menurut Sugiyono (2019) adalah sebagai berikut :

”Analisis deskriptif merupakan statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Dalam kegiatan menganalisis data, langkah-langkah yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sampling, dimana yang diselidiki adalah sampel yang merupakan sebuah himpunan dari pengukuran yang dipilih dari populasi yang menjadi perhatian dan penelitian.
2. Setelah pengumpulan data ditentukan, kemudian dapat ditentukan alat pengukuran untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diselidiki. Alat pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan atau kuesioner (angket).
3. Daftar kuesioner tersebut disebarakan ke 10 Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Kota Bandung. Setiap butir pertanyaan dari kuesioner memiliki 5 jawaban dengan masing-masing nilai (skor) yang berbeda untuk setiap pertanyaan positif, yaitu :

Tabel 3. 7
Bobot Skor Kuesioner Skala *Likert*

No	Alternatif Jawaban	Bobot Skor	
		Pertanyaan Positif	Pertanyaan Negatif
1	Sangat setuju/selalu/sangat positif/sangat baik	5	1
2	Setuju/sering/positif/baik	4	2

3	Ragu-ragu/kadang-kadang/netral/cukup	3	3
4	Tidak setuju/jarang/negatif/tidak baik	2	4
5	Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat negatif/sangat tidak baik	1	5

Sumber: Sugiyono (2019:147)

4. Setelah data tersebut terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik. Untuk menilai variabel X dan variabel Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata didapat dengan menjumlahkan dari keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Untuk menghitung rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

Untuk variabel X =

$$M_e = \frac{\sum xi}{n}$$

Untuk variabel Y =

$$M_e = \frac{\sum y}{n}$$

Keterangan :

M_e = Rata-rata

$\sum xi$ = Jumlah nilai X ke-i sampai ke-n

$\sum y$ = Jumlah nilai Y ke-i sampai ke-n

n = Jumlah Responden

Setelah mendapatkan rata-rata dari setiap variabel, kemudian dibandingkan dengan kinerja yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan nilai tertinggi tersebut diambil banyaknya pertanyaan dalam kuesioner. Nilai terendah dan nilai tertinggi tersebut diambil banyaknya pertanyaan dalam kuesioner dikalikan skor terendah (1) dan skor tertinggi (5) dengan menggunakan skala *likert*. Teknik dalam skala *likert*, dipergunakan untuk mencari jawaban.

1. Kompetensi (X1)

Untuk variabel kompetensi (X1) dengan 7 pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan terendah 1, sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi: } 7 \times 5 = 35$$

$$\text{Nilai terendah: } 7 \times 1 = 7$$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(35-7)}{5} = 5,6$ maka penulis menentukan

kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Kriteria Kompetensi

Interval	Kriteria
7,00 – 12,6	Tidak Baik
12,61 – 18,2	Kurang Baik
18,21 – 23,8	Cukup Baik
23,81 – 29,4	Baik
29,4 – 35,0	Sangat Baik

Berikut ini merupakan dimensi dari variabel Kompetensi :

a. Dimensi Pengetahuan

Untuk dimensi pengetahuan dengan 3 pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi : } 3 \times 5 = 15$$

$$\text{Nilai terendah : } 3 \times 1 = 3$$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(15-3)}{5} = 2,4$ maka penulis menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 9
Kriteria Pengetahuan

Interval	Kriteria
3,00 – 5,40	Tidak Baik
5,41 – 7,80	Kurang Baik
7,81 – 10,20	Cukup Baik
10,21 – 12,60	Baik
12,61 – 15,00	Sangat Baik

b. Dimensi latar belakang pendidikan

Untuk dimensi latar belakang pendidikan dengan 2 pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi : } 2 \times 5 = 10$$

$$\text{Nilai terendah : } 2 \times 1 = 2$$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(10-2)}{5} = 1,6$ maka penulis menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 10
Kriteria latar belakang pendidikan

Interval	Kriteria
2,00 – 3,60	Tidak Baik
3,61 – 5,20	Kurang Baik
5,21 – 6,80	Cukup Baik
6,81 – 8,40	Baik
8,41 – 10,00	Sangat Baik

c. Dimensi Pengalaman

Untuk dimensi pengalaman dengan 2 pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi : } 2 \times 5 = 10$$

$$\text{Nilai terendah : } 2 \times 1 = 2$$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(10-2)}{5} = 1,6$ maka penulis

menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 11
Kriteria Pengalaman

Interval	Kriteria
2,00 – 3,60	Tidak Baik
3,61 – 5,20	Kurang Baik
5,21 – 6,80	Cukup Baik
6,81 – 8,40	Baik
8,41 – 10,00	Sangat Baik

2. Independensi (X2)

Untuk variabel independensi (X2) dengan 11 pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan terendah 1, sehingga:

Nilai tertinggi: $11 \times 5 = 55$

Nilai terendah: $11 \times 1 = 11$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(55-11)}{5} = 8,8$ maka penulis menentukan

kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 12
Kriteria Independensi

Interval	Kriteria
11,00 – 19,80	Tidak Baik
19,81 – 28,60	Kurang Baik
28,61 – 37,40	Cukup Baik
37,41 – 46,20	Baik
46,21 – 55,00	Sangat Baik

Berikut ini merupakan dimensi dari variabel Independensi :

a. Dimensi Independensi Program Audit

Untuk dimensi independensi program audit dengan 3

pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, sehingga:

Nilai tertinggi : $3 \times 5 = 15$

Nilai terendah : $3 \times 1 = 3$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(15-3)}{5} = 2,4$ maka penulis

menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 13
Kriteria Independensi Program Audit

Interval	Kriteria
3,00 – 5,40	Tidak Baik
5,41 – 7,80	Kurang Baik
7,81 – 10,20	Cukup Baik
10,21 – 12,60	Baik
12,61 – 15,00	Sangat Baik

b. Dimensi Independensi Investigatif

Untuk dimensi independensi investigatif dengan 4 pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, sehingga:

Nilai tertinggi : $4 \times 5 = 20$

Nilai terendah : $4 \times 1 = 4$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(20-4)}{5} = 3,2$ maka penulis

menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 14
Kriteria Independensi Investigatif

Interval	Kriteria
4,00 – 7,20	Tidak Baik
7,21 – 10,40	Kurang Baik
10,41 – 13,60	Cukup Baik

13,61 – 16,80	Baik
16,81 – 20,00	Sangat Baik

c. Dimensi Independensi Pelaporan

Untuk dimensi independensi pelaporan dengan 4 pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, sehingga:

Nilai tertinggi : $4 \times 5 = 20$

Nilai terendah : $4 \times 1 = 4$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(20-4)}{5} = 3,2$ maka penulis

menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 15
Kriteria Independensi Pelaporan

Interval	Kriteria
4,00 – 7,20	Tidak Baik
7,21 – 10,40	Kurang Baik
10,41 – 13,60	Cukup Baik
13,61 – 16,80	Baik
16,81 – 20,00	Sangat Baik

3. Etika Profesi Auditor (X3)

Untuk etika profesi auditor (X3) dengan 14 pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, sehingga:

Nilai tertinggi: $14 \times 5 = 70$

Nilai terendah: $14 \times 1 = 14$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(70-14)}{5} = 11,2$ maka penulis menentukan

kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 16
Kriteria Etika Profesi Auditor

Interval	Kriteria
14,00 – 25,20	Tidak Baik
25,21 – 36,40	Kurang Baik
36,41 – 47,60	Cukup Baik
47,61 – 58,80	Baik
58,81 – 70,00	Sangat Baik

Berikut ini merupakan dimensi dari variabel Etika Profesi Auditor:

a. Dimensi Tanggung Jawab

Untuk dimensi tanggung jawab dengan 2 pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, sehingga:

Nilai tertinggi : $2 \times 5 = 10$

Nilai terendah : $2 \times 1 = 2$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(10-2)}{5} = 1,6$ maka penulis

menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 17
Kriteria Tanggung Jawab

Interval	Kriteria
2,00 – 3,60	Tidak Baik
3,61 – 5,20	Kurang Baik
5,21 – 6,080	Cukup Baik
6,81 – 8,40	Baik
8,41 – 10,00	Sangat Baik

b. Dimensi Kepentingan Publik

Untuk dimensi kepentingan publik dengan 3 pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi : } 3 \times 5 = 15$$

$$\text{Nilai terendah : } 3 \times 1 = 3$$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(15-3)}{5} = 2,4$ maka penulis

menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 18
Kriteria Kepentingan Publik

Interval	Kriteria
3,00 – 5,40	Tidak Baik
5,41 – 7,80	Kurang Baik
7,81 – 10,20	Cukup Baik
10,21 – 12,60	Baik
12,61 – 15,00	Sangat Baik

c. Dimensi Integritas

Untuk dimensi integritas dengan 2 pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi : } 2 \times 5 = 10$$

$$\text{Nilai terendah : } 2 \times 1 = 2$$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(10-2)}{5} = 1,6$ maka penulis

menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 19
Kriteria Integritas

Interval	Kriteria
2,00 – 3,60	Tidak Baik
3,61 – 5,20	Kurang Baik
5,21 – 6,80	Cukup Baik
6,81 – 8,40	Baik
8,41 – 10,00	Sangat Baik

d. Dimensi Objektivitas dan Independensi

Untuk dimensi objektivitas dan independensi dengan 2 pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, sehingga:

Nilai tertinggi : $2 \times 5 = 10$

Nilai terendah : $2 \times 1 = 2$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(10-2)}{5} = 1,6$ maka penulis

menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 20
Kriteria Objektivitas dan Independensi

Interval	Kriteria
2,00 – 3,60	Tidak Baik
3,61 – 5,20	Kurang Baik
5,21 – 6,80	Cukup Baik
6,81 – 8,40	Baik
8,41 – 10,00	Sangat Baik

e. Dimensi Keseksamaan

Untuk dimensi keseksamaan dengan 3 pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, sehingga:

Nilai tertinggi : $3 \times 5 = 15$

Nilai terendah : $3 \times 1 = 3$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(15-3)}{5} = 2,4$ maka penulis menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 21
Kriteria Keseksamaan

Interval	Kriteria
3,00 – 5,40	Tidak Baik
5,41 – 7,80	Kurang Baik
7,81 – 10,20	Cukup Baik
10,21 – 12,60	Baik
12,61 – 15,00	Sangat Baik

f. Dimensi Ruang Lingkup dan Sifat Jasa

Untuk dimensi ruang lingkup dan sifat jasa dengan 2 pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, sehingga:

Nilai tertinggi : $2 \times 5 = 10$

Nilai terendah : $2 \times 1 = 2$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(10-2)}{5} = 1,6$ maka penulis menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 22
Kriteria Ruang Lingkup dan Sifat Jasa

Interval	Kriteria
2,00 – 3,60	Tidak Baik
3,61 – 5,20	Kurang Baik
5,21 – 6,80	Cukup Baik

6,81 – 8,40	Baik
8,41 – 10,00	Sangat Baik

4. Kualitas Audit (Y)

Untuk Kualitas Audit (Y) dengan 8 pertanyaan, nilai tertinggi 5

dan nilai terendah 1, sehingga:

Nilai tertinggi: $8 \times 5 = 40$

Nilai terendah: $8 \times 1 = 8$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(40-8)}{5} = 6,4$ maka penulis menentukan

kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 23
Kriteria Kualitas Audit

Interval	Kriteria
8,00 – 14,40	Tidak Baik
14,41 – 20,80	Kurang Baik
20,81 – 27,20	Cukup Baik
27,21 – 33,60	Baik
33,61 – 40,00	Sangat Baik

Berikut ini merupakan dimensi dari variabel Kualitas Audit :

a. Dimensi Standar Pekerjaan Lapangan

Untuk dimensi standar pekerjaan lapangan dengan 4

pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, sehingga:

Nilai tertinggi : $4 \times 5 = 20$

Nilai terendah : $4 \times 1 = 4$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(20-4)}{5} = 3,2$ maka penulis

menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 24
Kriteria Standar Pekerjaan Lapangan

Interval	Kriteria
4,00 – 7,20	Tidak Baik
7,21 – 10,40	Kurang Baik
10,41 – 13,60	Cukup Baik
13,61 – 16,80	Baik
16,81 – 20,00	Sangat Baik

b. Dimensi Standar Pelaporan

Untuk dimensi standar pelaporan dengan 4 pertanyaan, nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, sehingga

Nilai tertinggi : $4 \times 5 = 20$

Nilai terendah : $4 \times 1 = 4$

Lalu kelas interval sebesar $\frac{(20-4)}{5} = 3,2$ maka penulis

menentukan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 25
Kriteria Standar Pelaporan

Interval	Kriteria
4,00 – 7,20	Tidak Baik
7,21 – 10,40	Kurang Baik
10,41 – 13,60	Cukup Baik
13,61 – 16,80	Baik
16,81 – 20,00	Sangat Baik

3.8.4 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif merupakan analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji besar pengaruh Kompetensi, Independensi dan Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)*.

3.8.4.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan peranan variabel bebas terhadap variabel terikat yang diuji dengan uji-t satu, taraf kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%.

Sugiyono (2019:248) menyebutkan berikut ini merupakan rumus untuk menguji signifikansi dari koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

t = Nilai koefisien dengan derajat bebas (dk) = $n-k-1$

n = Jumlah sampel

Distribusi t ini ditentukan oleh derajat kesalahan $dk = n-2$. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$
- b. H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

Apabila H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan, sedangkan apabila H_0 ditolak maka pengaruh variabel independen terhadap dependen adalah signifikan.

Rancangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. $H_{01} (\beta_1 = 0)$: Kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit
 $H_{a1} (\beta_1 \neq 0)$: Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit
2. $H_{02} (\beta_2 = 0)$: Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit
 $H_{a2} (\beta_2 \neq 0)$: Independensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit
3. $H_{03} (\beta_3 = 0)$: Etika Profesi Auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit
 $H_{a3} (\beta_3 \neq 0)$: Etika Profesi Auditor berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit

3.8.4.2 Analisis Koefisien Kolerasi

Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara masing-masing variabel. Analisis ini dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negatif, sedangkan kuat dan lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Untuk mengetahui hal tersebut, pada penelitian ini penulis menggunakan rumusan korelasi *Person Product Moment*, menurut Sugiyono (2019:246) rumus tersebut adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XiYi - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{\{n \sum Xi^2 - (\sum Xi)^2\}\{n \sum Yi^2 - (\sum Yi)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi pearson

Xi = Variabel independent

Yi = Variabel dependen

n = Banyak sampel

Pada dasarnya, nilai r dapat bervariasi dari -1 sampai dengan +1 atau secara sistematis dapat ditulis $-1 < r < +1$

1. Bila $r = 0$ atau mendekati nol, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali sehingga tidak mungkin terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila $0 < r < 1$, maka korelasi kedua variabel dapat dikatakan positif atau bersifat searah, dengan kata lain kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel independent terjadi Bersama-sama dengan kenaikan atau penurunan nilai-nilai dependen.
3. Bila $-1 < r < 0$ maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan negative atau bersifat berkebalikan, dengan kata lain kenaikan nilai-nilai variabel independent akan terjadi bersama-sama dengan penurunan nilai variabel dependen atau sebaliknya.

Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono (2019:248) sebagai berikut:

Tabel 3. 26
Interpretasi Koefisien Korelasi

Besarnya Pengaruh	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat Rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat Kuat

3.8.4.3 Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Sugiyono (2019:252) menyebutkan bahwa analisis regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

“Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.”

Persamaan umum dari regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a : Nilai Y bila $X = 0$ (konstan)

b : Angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan.

X : Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

3.8.4.4 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh secara parsial per sub variabel X terhadap variabel Y, maka dapat diketahui dengan cara mengkalikan nilai *standardized coefficients beta* dengan *correlations (zero order)*, yang mengacu pada hasil perhitungan dengan

menggunakan *software SPSS for windows* dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = \beta \times \text{zero order} \times 100\%$$

Keterangan :

β : Beta (nilai *standardized coefficients*)

Zero order : matriks korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

3.9 Rancangan Kuesioner

Sugiyono (2019:199) menyebutkan bahwa kuesioner adalah sebagai berikut :

“Kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tau dengan pasti variabel yang akan diukur dan tau apa yang bisa diharapkan dari reponden.”

Berdasarkan judul penelitian, kuesioner akan dibagikan kepada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di Kota Bandung. Kuesioner ini terdiri dari 40 pertanyaan, yaitu 7 (tujuh) pertanyaan untuk Kompetensi, 11 (sebelas) pertanyaan untuk Independensi, 14 (empat belas) pertanyaan untuk Etika Profesi Auditor, dan 8 (delapan) pertanyaan untuk kualitas audit.

A. Kompetensi (X1)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Instrumen
Kompetensi (X1) “Kompetensi merupakan kebutuhan bagi auditor yang didapat auditor melalui pendidikan formal dalam bidang audit dan akuntansi, maupun melalui pengalaman kerja serta pendidikan profesional sejenis.”	1. Pengetahuan	Memiliki pengetahuan untuk melakukan <i>analytical review</i>	Sebagai seorang auditor, saya mempelajari dan membandingkan hubungan antara data keuangan dan non keuangan dalam proses audit
		Memiliki pengetahuan tentang akuntansi dan <i>auditing</i>	Sebagai seorang auditor, saya membandingkan laporan keuangan yang diaudit dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menerapkan SPAP dalam proses audit laporan keuangan
		Memiliki pengetahuan dasar tentang penggunaan perangkat lunak audit	Sebagai seorang auditor, saya menggunakan program audit berbasis EDP (<i>Electronic Data Processing</i>)
	2. Latar belakang pendidikan	Memiliki tingkat pendidikan formal yang mendukung	Dalam melaksanakan audit, saya menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh

Sumber: A. Arens, <i>et al</i> (2015:63)			melalui pendidikan akuntansi
		Pendidikan dan pelatihan profesional yang berkelanjutan	Saya mengikuti pelatihan profesional yang mendukung pekerjaan saya sebagai seorang auditor
	3. Pengalaman	Pengalaman dalam melakukan <i>auditing</i> dalam berbagai entitas bisnis	Saya ditugaskan melakukan audit tidak hanya pada satu jenis perusahaan
		Memiliki pengalaman dalam penggunaan teknologi informasi dalam lingkungan bisnis berbasis <i>Electronics Data Processing (EDP)</i>	Saya melakukan audit dengan menggunakan teknologi informasi dalam lingkungan bisnis berbasis <i>Electronics Data Processing (EDP)</i>
Sumber: J. Timothy Louwers, <i>et al</i> (2013:43)			

B. Independensi (X2)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Instrumen
Independensi (X2) "Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh	Aspek Independensi : 1. Independensi Program Audit	Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial atau friksi yang dimaksudkan	Sebagai seorang auditor, saya bebas dari intervensi manajerial yang dimaksudkan

<p>pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, maka audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa ada pengaruh dari luar.”</p>		<p>untuk menghilangkan (<i>eliminate</i>), menentukan (<i>specify</i>) atau mengubah (<i>modify</i>) apa pun dalam audit</p>	<p>untuk menghilangkan, menentukan, dan mengubah program audit</p>
		<p>Bebas dari intervensi apa pun dari sikap tidak kooperatif yang berkenaan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih</p>	<p>Sebagai seorang auditor, saya bebas dari intervensi dari sikap tidak kooperatif yang berkenaan dengan program audit yang dipilih</p>
		<p>Bebas dari upaya pihak luar yang memaksakan pekerjaan audit itu di <i>review</i> di luar batas-batas kewajaran dalam proses audit</p>	<p>Sebagai seorang auditor, saya bebas dari upaya pihak luar yang memaksakan pekerjaan audit itu di <i>review</i> di luar batas-batas kewajaran dalam proses audit</p>
	2. Independensi Investigatif	<p>Akses langsung dan bebas atas seluruh buku, catatan, pimpinan pegawai perusahaan dan sumber</p>	<p>Sebagai seorang auditor, saya memiliki akses langsung untuk memperoleh informasi mengenai</p>

		informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan, kewajiban dan sumber-sumbernya.	kegiatan perusahaan, kewajiban dan sumber-sumbernya
		Kerja sama yang aktif dari pimpinan perusahaan selama berlangsungnya kegiatan audit	Sebagai seorang auditor, saya bekerjasama secara aktif dengan pimpinan perusahaan dalam pelaksanaan audit
		Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu <i>evidential matter</i> (sesuatu yang mempunyai nilai pembuktian)	Sebagai seorang auditor, saya bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menentukan kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu <i>evidential matter</i> (sesuatu yang mempunyai nilai pembuktian)

		Bebas dari kepentingan atau hubungan pribadi yang akan menghilangkan atau membatasi pemeriksaan atas kegiatan, catatan atau orang yang seharusnya masuk dalam lingkup pemeriksaan	Sebagai seorang auditor, saya menjaga sikap agar bebas dari kepentingan atau hubungan pribadi yang akan menghilangkan atau membatasi pemeriksaan atas kegiatan, catatan atau orang yang seharusnya masuk dalam lingkup pemeriksaan
	3. Independensi Pelaporan	Bebas dari perasaan loyal kepada seseorang atau merasa berkewajiban kepada seorang untuk mengubah dampak dari fakta yang di laporkan	Sebagai seorang auditor, saya menjaga sikap untuk tidak mengikuti segala keinginan pihak lain diluar pekerjaan saya
		Menghindari praktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari laporan formal dan memasukannya ke dalam laporan	Sebagai seorang auditor, saya melaporkan seluruh hasil audit termasuk hal-hal penting

Sumber: A. Arens, <i>et al</i> (2015:111)	Sumber: Theodorus M. Tuanakotta (2011:7)	informal dalam bentuk apa pun	di dalam laporan formal
		Menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas (kabur, samar-samar) baik yang disengaja maupun yang tidak di dalam pernyataan fakta, opini dan rekomendasi	Sebagai seorang auditor, saya menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas (kabur, samar-samar) baik yang disengaja maupun yang tidak di dalam pernyataan fakta, opini dan rekomendasi
		Bebas dari upaya untuk memveto (<i>judgement</i>) auditor mengenai apa yang seharusnya masuk dalam laporan audit, baik yang bersifat fakta maupun opini	Sebagai seorang auditor, saya berpegang teguh pada hasil audit yang seharusnya masuk dalam laporan audit, baik yang bersifat fakta maupun opini

C. Etika Profesi Auditor (X3)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Instrumen
Etika Auditor (X3) “Standar-standar, prinsip-prinsip,	Prinsip-prinsip Etika Profesi : 1. Tanggung jawab	Melaksanakan pertimbangan profesional dalam semua pelaksanaan audit	Sebagai seorang auditor saya mampu mempertimbangkan dan membuat keputusan sendiri

interpretasi atau peraturan etika, dan kaidah etika yang harus dilakukan secara auditor seperti tanggung jawab profesi, kepentingan public, integritas, obyektivitas auditor, keseksamaan dan lingkup dan sikap jasa dalam memeriksa laporan keuangan”.			tanpa tekanan dari pihak lain dalam semua pelaksanaan audit
		Memiliki moral yang sensitif dalam semua pelaksanaan audit	Sebagai seorang auditor saya berusaha memahami benar atau salah dan berpendirian kuat untuk berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dalam semua pelaksanaan audit
	2. Kepentingan Publik	Melayani kepentingan publik	Sebagai seorang auditor saya menerima semua kewajiban auditor sebagai bentuk pelayanan terhadap kepentingan publik
		Menghargai kepercayaan publik	Sebagai seorang auditor saya mampu menempatkan diri dalam situasi apapun di hadapan publik
		Menunjukkan komitmen profesionalisme	Sebagai seorang auditor saya meningkatkan kualitas pelayanan kepada klien dan memberikan informasi yang sebenarnya kepada

			publik melalui audit yang professional.
3. Integritas	Mempertahankan kepercayaan publik		Sebagai seorang auditor saya melaksanakan audit dengan mempertahankan sikap jujur dan mempertahankan kewibawaan sebagai upaya untuk mempertahankan kepercayaan publik
	Memperluas kepercayaan publik		Sebagai seorang auditor saya tidak mempunyai kepentingan keuangan atau mempunyai hubungan usaha dengan klien yang diaudit sebagai bentuk usaha untuk memperluas kepercayaan publik
4. Objektivitas dan Independensi	Mempertahankan objektivitas		Sebagai seorang auditor saya menyampaikan hasil pemeriksaan sesuai fakta
	Mempertahankan independensi		Sebagai seorang auditor saya tidak memihak maupun terpengaruh pihak lain dan tidak

			dalam hubungan dengan pihak lain ketika menyediakan jasa audit
	5. Keseksamaan	Memperhatikan standar teknis	Sebagai seorang auditor saya memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan inspeksi, observasi, tanya-jawab, dan konfirmasi agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit
		Memperhatikan etis profesi	Sebagai seorang auditor saya memiliki sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan
		Meningkatkan kompetensi	Sebagai seorang auditor saya menjalani pendidikan dan berbagai pelatihan untuk

Sumber: A. Arens, <i>et al</i> (2015:91)			melaksanakan tanggung jawab professional
	6. Ruang Lingkup dan Sifat Jasa	Memperhatikan ruang lingkup	Sebagai seorang auditor saya memperhatikan prinsip-prinsip kode perilaku profesi dalam menentukan lingkup yang akan disediakan
		Memperhatikan sifat jasa	Sebagai seorang auditor saya memperhatikan prinsip-prinsip kode perilaku profesi dalam menentukan sifat jasa yang akan disediakan
Sumber: Arens (2015:99)			

D. Kualitas Audit (Y)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Instrumen
Kualitas Audit (Y) “Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam	Standar Kualitas Audit : 1. Pelaksanaan (Standar Pekerjaan Lapangan)	Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.	Sebagai seorang auditor, saya melakukan tahap-tahap perencanaan audit termasuk menyusun program audit.

<p>setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya.”</p>		<p>Sebagai seorang auditor, saya melakukan supervisi kepada asisten yang membantu pekerjaan audit</p>
	<p>Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal.</p>	<p>Sebagai seorang auditor, saya memperoleh informasi mengenai kondisi klien seperti latar belakang perusahaan, kegiatan bisnis perusahaan termasuk pengendalian internal</p>
	<p>Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan</p>	<p>Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan</p>

	2. Adminnistrasi Akhir (Standar Pelaporan)	Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.	Dalam laporan audit, saya menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
	Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.	Dalam laporan audit, saya mengidentifikasi mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.	
	Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit	Saya memberikan penilaian mengenai kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan.	

<p>A. Arens, <i>et al</i> dalam Amir Abadi Jusuf (2011:47)</p>	<p>SPAP (2011:150)</p>	<p>Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan, dalam laporan auditor</p>	<p>Sebagai seorang auditor, saya menyatakan alasan-alasan yang mendasari pemberian pendapat saya dalam laporan audit.</p>
--	----------------------------	--	---